



TAHUN 2023

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN JUAI**

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Juai menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Juai dan telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Juai tahun 2023 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Juai pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

**CAMAT JUAI**
NANANG EDWARD, S.Sos., MM
NIP. 19800127 200604 1 016

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Juai Tahun 2023 ini disusun untuk menyajikan laporan capaian indikator kinerja dan evaluasi atas tujuan dan sasaran yang merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Juai selama tahun 2023. Adapun penganggaran kegiatan tersusun dalam 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

Adapun tujuan strategis Kecamatan Juai tahun 2023 setelah dilakukan penyusunan kembali pohon kinerja dan cascading adalah terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik, dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan masyarakat (IKM). Capaian nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2023 adalah sebesar 78,62 dengan rasio capaian sebesar 100,02%. Tujuan strategis adalah merupakan perjanjian kinerja kepala skpd dalam hal ini camat.

Sedangkan untuk capaian sasaran strategis tahun 2023 yang merupakan perjanjian kinerja pejabat pengawas (kepala seksi) dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif, realisasinya adalah 60 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) atau persentase capaian tahun ini 100%.
2. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan dengan indikator kinerja yaitu persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani, realisasinya adalah sebesar 100%.
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan dan realisasi sebesar 100%.

4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa dengan indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi keuangan, realisasinya adalah sebesar 100%.

Alokasi anggaran Kecamatan Juai tahun 2023 berjumlah Rp. 4.812.679.541,00 yang dengan rincian anggaran belanja operasi sebesar Rp. 4.699.329.941,00 dan belanja modal sebesar Rp. 113.349.600,00. Anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 4.432.197.076,00 atau sekitar 92,09% yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.4.327.162.076,00 atau 92,08% dan belanja modal sebesar Rp.105.035.000,00 atau sekitar 92,66%.

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Juai Tahun 2023 ini maka dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kantor Kecamatan Juai dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.

Juai, Februari 2024

CAMAT JUAI



NANANG EDWARD, S.Sos., MM
NIP. 19800127 200604 1 016

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | 2 |
| RINGKASAN EKSEKUTIF..... | 3 |
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR..... | iii |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 20 |
| 1.1. LATAR BELAKANG | 20 |
| 1.2. LANDASAN HUKUM | 21 |
| 1.3. TUJUAN | 21 |
| 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD | 22 |
| 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN..... | 25 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 27 |
| 2.1 Rencana Strategis (RENSTRA) | 27 |
| 2.2 Rencana Kerja (RENJA)..... | 20 |
| 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) | 26 |
| 2.4 Perjanjian Kinerja (PK)..... | 20 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 21 |
| 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI..... | 21 |
| 3.2 REALISASI ANGGARAN | 27 |
| 3.3 ANALISIS KINERJA LAINNYA | 32 |
| BAB IV PENUTUP | 36 |
| 4.1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SKPD BARU | 20 |
| 4.2. RANGKUMAN SINGKAT CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA..... | 20 |
| 4.3. UPAYA PERBAIKAN | 20 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|---------------|
| Tabel 1. 1 Daftar jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan | 24 |
| Tabel 1. 2 Daftar nominatif PNS Kecamatan Juai | 24 |
| Tabel 2. 1 Data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran renstra 2021-2016..... | 28 |
| Tabel 2. 2 Daftar program kegiatan Renja Perubahan 2021 | 20 |
| Tabel 2. 3 Data Indikator Kinerja Utama Kecamatan Juai berdasarkan PK baru..... | Error! |
| Bookmark not defined. | |
| Tabel 2. 4 Data Perjanjian Kinerja Camat 2021 berdasarkan PK baru..... | 20 |
| Tabel 3. 1 Daftar capaian kinerja utama Kecamatan Juai sesuai PK baru..... | 21 |
| Tabel 3. 2 Rincian realisasi anggaran per 31 Desember 2021 | 28 |
| Tabel 3. 3 Data analisis efesiensi anggaran dan kinerja TA 2021 sesuai PK baru | 32 |
| Tabel 4. 1 Daftar rincian capaian indikator perjanjian kinerja tahun 2021 | 20 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Juai di Kabupaten Balangan..... | 22 |
| Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juai Per 31 Desember 2022 | 23 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Juai Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Kecamatan di Kabupaten Balangan, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Karena tugas yang diemban oleh Kecamatan Juai cukup berat, maka agar dapat berhasil diperlukan adanya Rencana Kinerja (Renja) Kecamatan Juai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Juai, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) berupa Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam tahun 2023.

Renja yang sudah dilaksanakan selama tahun 2023, kemudian pada setiap akhir tahun disempurnakan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam sebuah LKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kecamatan Juai untuk pencapaian dalam tahun 2023. Evaluasi atas LKIP berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Kecamatan Juai dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Kecamatan Juai harus terus menerus mengalami perubahan ke arah perbaikan. Rencana Strategis Kecamatan Juai yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan pelayanan kecamatan dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan masyarakat terkait layanan kecamatan dapat terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Juai secara nyata dalam upaya pemberian pelayanan kepada masyarakat

umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan

1.3. TUJUAN

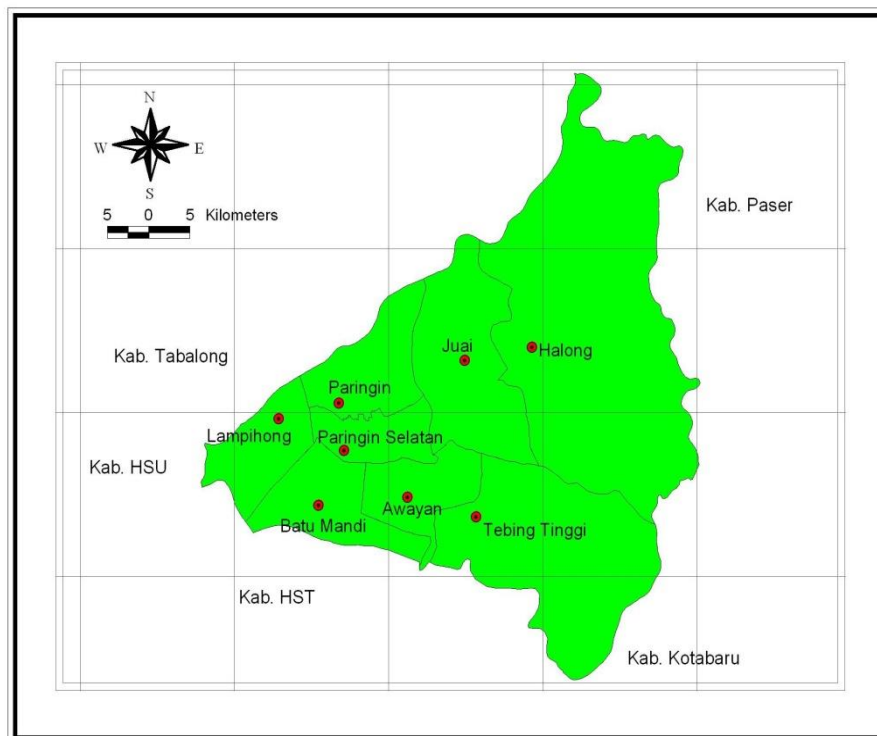
Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2023. Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Juai Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Juai dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Kecamatan Juai sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

Kecamatan Juai secara keseluruhan memiliki luas + 386,88 km² yang terbagi dalam 21 Desa dan memiliki jumlah penduduk Laki-laki 7.941 Perempuan 7.401 jumlah 15.342 Jiwa. Dan memiliki letak geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong sebelah Utara, Kecamatan Halong sebelah Timur, Kecamatan Awayan sebelah Selatan dan Kecamatan Paringin sebelah Barat.



Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Juai di Kabupaten Balangan

Dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan yang dipimpin Camat mempunyai tugas :

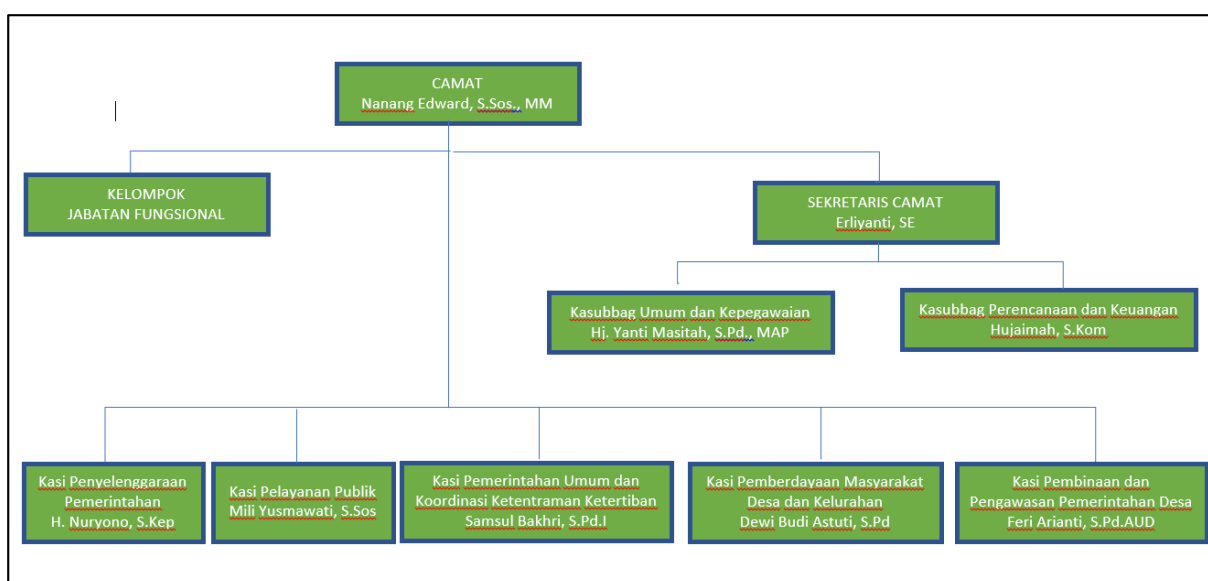
1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum.

6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan.
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas yang diemban kecamatan di Kabupaten Balangan, Camat sebagai kepala/pimpinan SKPD di kecamatan memiliki stakeholder sebagaimana susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
3. Seksi penyelenggaraan pemerintahan
4. Seksi pelayanan publik
5. Seksi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban
6. Seksi pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
7. Seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
8. Kelurahan
9. Kelompok jabatan fungsional

Bagan struktur organisasi Kecamatan Juai Kabupaten Balangan per 31 Desember 2023 nampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Juai Per 31 Desember 2023

Adapun jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pejabat struktural dan fungsional dari Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. 1 Daftar jumlah pegawai menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/golongan

| SKPD | JLH (ORG) | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | JLH (ORG) | PANGKAT | JLH (ORG) | GOLONGAN | JLH (ORG) |
|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---------|--------------|----------|--------------|
| KANTOR CAMAT JUI | 17 | SD | - | I/a | - | I | - |
| | | SLTP | 4 | I/b | - | II | 5 |
| | | SLTA | 3 | I/c | - | III | 10 |
| | | D1 | - | I/d | - | IV | 2 |
| | | D2 | - | II/a | 2 | | |
| | | D3 | - | II/b | - | | |
| | | D4 | - | II/c | 2 | | |
| | | S1 | 6 | II/d | 1 | | |
| | | S2 | 4 | III/a | 3 | | |
| | | S3 | - | III/b | - | | |
| | | | | III/c | 4 | | |
| | | | | III/d | 3 | | |
| | | | | IV/a | 2 | | |
| | | | | IV/b | - | | |
| | | | | IV/c | - | | |
| | | | | IV/d | - | | |
| | | | | IV/e | - | | |

Sedangkan nama Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Juai Kabupaten Balangan baik pejabat struktural maupun fungsional umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. 2 Daftar nominatif PNS Kecamatan Juai

| NO | NAMA DAN NIP | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN |
|----|---|-----------------------|------------------|
| 01 | Nanang Edward,S.Sos.,M.M 19800127 200604 1 016 | Pembina (IV/a) | Camat |
| 02 | Erliyanti, SE 19851020 201001 2 031 | Penata Tk.I (III/d) | Sekretaris Camat |

| | | | |
|----|--|----------------------|---|
| 03 | Hj. Yanti Masitah,S.Sos.,M.Ap 19670319 198703 2 009 | Pembina (IV/a) | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 04 | Mili Yusmawati, S.Sos 19801117 200604 2 024 | Penata Tk.I (III/d) | Kasi Pelayanan Publik |
| 05 | H. Nuryono, S.Kep 19730507 199602 1 002 | Penata Tk.I (III/d) | Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan |
| 06 | Dewi Budi Astuti,S.Pd 19820305 201001 2 017 | Penata Tk.I (III/d) | Kasi Pemberd. Masy. Desa dan Kelurahan |
| 07 | Samsul Bakhri, S.Pd.I 19831125 200801 1 006 | Penata (III/c) | Kasi Pemerintahan Umum & Koordinasi Trantib |
| 08 | Feri Arianti, S.Pd.AUD 19840215 200701 2 002 | Penata (III/c) | Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 09 | Hujaimah,A.Md 19880212 201001 2 016 | Penata (III/c) | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan |
| 10 | Muhammad Aditya Pratama, SE 19910214 202012 1 009 | Penata Muda (III/a) | Staf Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| 11 | Yusnani 19770501 200701 1 016 | Penata Muda (III/a) | Staf Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan |
| 12 | Akhmad Basuki 19780719 200701 1 007 | Penata Muda III/a | Staf Binwasdes |
| 13 | Saihani 1977052 200906 1 002 | Pengatur Tk.I (II/d) | Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan |
| 14 | Mursada 19710215 200701 1 030 | Pengatur (II/c) | Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 15 | Ali Sadikin 19680816 198804 1 001 | Pengatur (II/c) | Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 16 | Misnu Raga 19690718 200701 1 029 | Pengatur Muda (II/a) | Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian |
| 17 | Ruslan 19690330 2021212 1 003 | Pengatur Muda (II/a) | Staf Kasubbag Umum dan Kepegawaian |

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika LKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum singkat SKPD sesuai SOTK baru serta sistematika laporan.
- Bab II : Perencanaan kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

- Bab III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2023
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kecamatan Juai Kabupaten Balangan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Juai mendukung pelaksanaan misi nomor empat yaitu meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara. Hal ini dilakukan dengan cara mewujudkan tata kelola pemerintah kecamatan yang baik di lingkungan wilayah Kecamatan Juai.

2.1 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Juai sebagaimana yang tercantum dalam dokumen Renstra penyesuaian tahun 2021-2026 adalah terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Adapun nilai IKM tersebut didapatkan dari penilaian atas semua pelayanan publik yang dilakukan oleh semua kasi dan kasubbag di Kecamatan Juai.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan sasaran dari tujuan SKPD Kecamatan Juai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat, dengan indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dengan indikator kinerja jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif.
3. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan, dengan indikator kinerja persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani.
4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan serta persentase desa yang tertib administrasi keuangan.

Adapun data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran Kecamatan Juai tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran renstra 2021-2016

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | | | | | |
|--|----------------------------------|---|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Kecamatan yang Baik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | | | 87,50 | 87,55 | 87,60 | 87,65 | 87,70 | 87,75 |
| | | | | % | % | % | % | % | % |
| | | Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat | indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial | 87,50 | 87,55 | 87,60 | 87,65 | 87,70 | 87,75 |
| | | | | % | % | % | % | % | % |
| | | Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat | jumlah lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang aktif | - | - | 60 | 70 | 80 | 90 |
| | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan | persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa | persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | | | persentase desa yang tertib administrasi keuangan | - | - | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.2 RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja tahun 2023 Kecamatan Juai terdiri dari 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Kecamatan Juai TA 2023

| No. | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator | Target | |
|-----|---|--|-----------------|---------------|
| | | | Kinerja | Keuangan |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/KabupatenKota | Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) | Baik (67,00) | 3.825.463.341 |
| | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun | 6 Dokumen | 91.990.700 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 Dokumen | 75.588.600 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 2 Dokumen | 5.879.600 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 Dokumen | 10.522.500 |



| | | | | |
|--|--|--|--------------------|---------------|
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku | 12 bulan | 2.905.008.991 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 22 Orang Per Bulan | 2.798.827.791 |
| | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4 Dokumen | 106.181.200 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah | 12 Bulan | 81.600.000 |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 Orang | 81.600.000 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 12 Bulan | 323.247.400 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1.460.900 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 116.057.500 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 125.640.000 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 80.089.000 |



| | | | | |
|----|--|---|------------|-------------|
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 12 Bulan | 213.705.900 |
| | Penyediaan Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 Laporan | 70.536.100 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 135.336.000 |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 7.833.800 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 12 Bulan | 209.910.350 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 13 Unit | 90.346.350 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 2 Unit | 119.564.000 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan | 100% | 96.268.100 |
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | 100% | 86.217.700 |



| | | | | |
|----|--|---|--------------------------|-------------|
| | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 100% | 86.217.700 |
| | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat | 100% | 10.050.400 |
| | Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | 10.050.400 |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa | 100% | 199.160.300 |
| | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa | 100% | 74.046.600 |
| | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 5.129.200 |
| | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 63.087.400 |



| | | | | |
|----|---|--|-------------|-------------|
| | Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 5.830.000 |
| | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100% | 125.113.700 |
| | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 50 Keluarga | 125.113.700 |
| 4. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sekto | 100% | 119.878.800 |
| | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | Persentaser koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum | 100% | 119.878.800 |
| | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 119.878.800 |
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Persentase desa tertib administrasi umum | 100% | 341.236.500 |



| | | | | |
|--|---|---|-----------|-------------|
| | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah | 100% | 341.236.500 |
| | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 450 Orang | 143.414.100 |
| | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen | 197.822.400 |
| | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa | 100% | 230.672.500 |
| | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa | 100% | 230.672.500 |



| | | | | |
|--|--|---|-----------|------------|
| | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 89.563.900 |
| | Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 88.390.200 |
| | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 1 Dokumen | 52.718.400 |

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Juai pada perencanaan kinerja (2021-2026) dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini.

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Juai Tahun 2023

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah kecamatan yang baik

Indikator : indek kepuasan masyarakat (IKM)

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA UTAMA | MAKNA, ALASAN PEMILIHAN, PERHITUNGAN ATAU PENJELASAN | PENANGGUNG JAWAB | SUMBER DATA |
|----|---|---|---|------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya fasilitas pelayanan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial | <p>Makna Indikator : Tingkat Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh Seksi Pelayanan Publik kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Juai</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> | Camat Juai | Seksi Pelayanan Publik |



| | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---|
| | | | <p>Sebagai Indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai dalam memberikan layanan kepada warga masyarakat</p> <p>Formulasi Perhitungan : Nilai rata-rata dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) per semester terhadap pelayanan publik yang diberikan seksi pelayanan dan kesejahteraan social</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</p> | | |
| 2 | Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif | <p>Makna Indikator : Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memiliki susunan kepengurusan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai sarana bagi Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah LKD yang aktif pada seluruh desa di Kecamatan Juai</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p> | Camat Juai | Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |
| 3 | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani | <p>Makna Indikator : Tingkat ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan</p> <p>Alasan Pemilihan :</p> | Camat Juai | Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban |



| | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|
| | | | <p>Sebagai indikator bagi Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dalam menjaga kondusifitas wilayah kecamatan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terjadi dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p> | | |
| 4 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase desa tertib administrasi pemerintahan | <p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Administrasi Pemerintahan</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai Indikator bagi Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam memberikan pembinaan administrasi pemerintahan</p> <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah LPPD dan laporan kinerja BPD yang disampaikan dibagi Jumlah Seluruh Desa dikali 2 dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri</p> | Camat Juai | Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan |
| | | Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan | <p>Makna Indikator : Tingkat Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa di Wilayah Kecamatan Juai</p> <p>Alasan Pemilihan : Sebagai indikator bagi Pemerintah Kecamatan Juai atas pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa</p> | Camat Juai | Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>Formulasi Perhitungan : Jumlah Desa yang Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa dibagi Jumlah Seluruh Desa dikali 100%</p> <p>Sumber/Referensi Indikator : Analisa Mandiri, berdasarkan amanat permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa</p> | | |
|--|--|--|--|--|--|



2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK)

Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2023 maka Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 menurut perencanaan kinerja dapat dilihat pada tabel perjanjian kinerja eselon III dan IV sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 4 Data Perjanjian Kinerja bagi Camat TA 2023

| NO | KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS) | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|---|---|--------|
| 01 | Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial | 87,60 |
| 02 | Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif | 60 LKD |
| 03 | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani | 100% |
| 04 | Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Persentase desa tertib administrasi pemerintahan | 100% |
| | | Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya ada beberapa hal yang diukur yaitu:

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut adalah data capaian sasaran kinerja Kecamatan Juai tahun 2023 berdasarkan perencanaan kinerja (renstra penyesuaian 2021-2026).

Tabel 3. 1 Capaian sasaran kinerja pertama Kecamatan Juai sesuai PK

| No. | Sasaran Kinerja Utama | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir Renstra | Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi / Capaian terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|--|---|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|--------------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 1. | Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan dan kesejahteraan sosial | 87,59 | 87,60 | 87,62 | 100,02% | 87,75 | 99,85 | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 99,97% |

Adapun penjelasan dari capaian kinerja kepala SKPD (camat) di atas adalah sebagai berikut :

1. Nilai capaian tahun 2022 adalah sebesar 87,59 yang didapat dari formula perhitungan nilai IKM semester 1 tahun 2022 ditambah nilai IKM semester 2 tahun 2022 lalu dibagi 2 (dua). Nilai IKM semester 1 tahun 2022 adalah 87,56 dan IKM semester 2 tahun 2022 adalah 87,62 sehingga didapat rata-rata untuk IKM tahun 2022 sebesar 87,59.
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2023 adalah rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 yang disusun oleh Seksi Pelayanan Publik Kecamatan Juai. Nilai rata-rata IKM Kecamatan Juai didapat dari jumlah IKM semester I dan Semester II dibagi 2 (dua). Adapun nilai IKM semester 1 tahun 2023 adalah sebesar

- 87,51 dan semester 2 sebesar 87,73 sehingga jika jumlah kedua nilai IKM tersebut dijumlahkan dan dibagi 2 (dua) maka didapat nilai IKM tahun 2023 adalah sebesar 87,62
3. Serapan anggaran tahunan sebesar 100% didapatkan dari realisasi anggaran sebesar Rp. 96.268.100,- dengan pagu anggaran sebesar Rp. 96.238.100,- atau sebesar 99,97%.
 4. Target akhir renstra adalah sebesar 87,75 sehingga jika dibandingkan dengan nilai IKM tahun 2023 sebesar 87,62 maka akan didapatkan nilai rasio capaian terhadap akhir renstra sebesar 99,85% dengan formulasi perhitungan nilai IKM tahun 2022 dibagi nilai target IKM akhir renstra lalu hasilnya dikalikan 100%.

Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Juai semakin terorganisir dan selalu dilaksanakan perbaikan untuk peningkatan kualitas layanan.
2. Adanya inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Terdapat dana penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat yaitu pada sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan sub kegiatan Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan yang berisi belanja barang dan jasa peningkatan kualitas layanan berupa sosialisasi produk layanan kepada masyarakat dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja di atas maka dapat disimpulkan kendala/faktor penghambat dari pelaksanaan upaya peningkatan capaian kinerja dan keuangan Kecamatan Juai tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Proses penganggaran yang kurang maksimal
Walaupun target tercapai namun sebenarnya hasilnya masih dapat dimaksimalkan lagi jika anggaran yang disediakan memuat pendanaan kegiatan sosialisasi pelayanan publik dan pemenuhan sarana prasarana pendukung pelayanan publik.
2. Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan dan tupoksinya.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang teknis kegiatan.
4. Kurangnya pengawasan internal terhadap pencapaian target kinerja masing-masing ASN.

Beberapa hal yang dapat menjadi solusi dan upaya perbaikan capaian kinerja di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Memaksimalkan proses perencanaan anggaran baik dari segi penentuan belanja maupun besaran belanja agar sesuai dengan rencana realisasi.

2. Penempatan SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan dan tupoksinya serta sesuai dengan latar belakang pendidikannya.
3. Meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia dengan mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi.
4. Menganggarkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja SKPD.
5. Meningkatkan pengawasan internal terhadap pencapaian target kinerja ASN dan meningkatkan peran aktif ASN bersangkutan dalam melaporkan hasil capaian kerjanya masing-masing.

Tabel 3. 2 Capaian sasaran kinerja kedua Kecamatan Juai sesuai PK

| No. | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir | Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi / Capaian terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|---|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 1. | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif | - | 60 | 60 | 100% | 90 | 66,67% | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 99,98% |

Target jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif pada tahun 2023 adalah sebanyak 60 Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan telah tercapai 100%. Adapun faktor pendukung tercapainya target sasaran kinerja kedua ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang secara langsung mendukung upaya peningkatan kapasitas LKD di desa dimana terdapat 3 (tiga) sub kegiatan di dalamnya yang menyediakan dana untuk pelaksanaan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pendataan Lembaga Kemasyarakatan Desa di lingkup pemerintah Kecamatan Juai. Serta adanya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang mengakomodir pendanaan untuk pembinaan dan peningkatan kapasitas PKK sebagai salah satu LKD yang harus aktif dalam kegiatan pembangunan di desa.
2. Adanya koordinasi yang terjalin dengan baik antara kecamatan dan desa dalam pendataan dan pembinaan LKD aktif di desa.
3. LKD yang telah terbentuk memiliki struktur organisasi/kepengurusan sehingga memenuhi persyaratan LKD aktif.

4. Serapan anggaran sebesar Rp. 199,160,300,- dari anggaran sebesar Rp. 199,130,300,- atau sebesar 99,98%.
5. Capaian tahun 2022 tidak dapat diidentifikasi dikarenakan penetapan indikator LKD sebagai salah satu indikator sasaran SKPD Kecamatan Juai pada tahun 2023 sehingga pada tahun 2022 hal tersebut belum dilaksanakan.
6. Capaian tahun 2023 terhitung sebesar 60 (enam puluh) LKD dimana LKD dimaksud tersebar di 21 (dua puluh satu) desa dan dari berbagai kelompok LKD yaitu PKK, RT/RW, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
7. Nilai capaian terhadap akhir renstra didapatkan dari formula perhitungan capaian tahun 2023 sebesar 60 LKD dibagi target akhir renstra 90 LKD lalu dikalikan 100%.

Faktor penghambat/kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut :

1. Tidak ada dana peningkatan kapasitas LKD yang secara langsung dapat memfasilitasi pembinaan per jenis LKD.
2. Pembentukan dan pengaktifan LKD memerlukan dana penyelenggaraan berupa sosialisasi pembentukan dan fasilitasi pembinaan ke desa-desa.
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat khususnya anggota LKD untuk aktif dalam perencanaan pembangunan desa.
4. SDM di seksi pemberdayaan masyarakat desa Kecamatan Juai belum terpenuhi untuk melakukan pembinaan secara mendalam untuk penyelenggaraan pembinaan LKD.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan proses perencanaan anggaran baik dari segi penentuan belanja maupun besaran belanja agar sesuai dengan rencana realisasi..
2. Meningkatkan kompetensi SDM yang tersedia dengan mengikuti bimbingan teknis atau pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi serta memfasilitasi pembinaan ke desa didampingi oleh SKPD terkait yang membidangi mengenai pembinaan masing-masing LKD.
3. Menganggarkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja SKPD.

Tabel 3. 3 Capaian sasaran kinerja ketiga Kecamatan Juai sesuai PK

| No. | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir | Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi / Capaian terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|--|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 1. | Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 99,81% |

Berdasarkan data tersebut di atas dinyatakan bahwa capaian indikator persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang tertangani adalah 100%. Artinya semua gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaporkan ke Kecamatan Juai melalui kasi pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban telah ditangani dengan baik. Capaian tahun 2022 tidak dapat teridentifikasi dikarenakan pada tahun 2022 data tersebut belum menjadi indikator kinerja sasaran SKPD sehingga tidak pernah dilakukan perhitungan capaiannya di tahun 2022. Adapun faktor pendorong tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya sub kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara Republik Indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan yang menyediakan dana untuk pelaksanaan koordinasi dengan forkopimcam dan desa dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban.
2. Hubungan kerjasama antar forkopimcam, Kecamatan Juai dan desa telah terjalin baik sebelumnya sehingga memudahkan dalam pelaksanaan koordinasi penanganan ataupun pelaporan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Juai.
3. Adanya bantuan penanganan kasus hukum berupa penyediaan ruang restorative justice, dimana masyarakat diberi ruang mediasi penyelesaian kasus gangguan ketentraman dan ketertiban sebelum kasus dilimpahkan ke pengadilan negeri atau kejaksaaan.
4. Serapan anggaran sebesar Rp. 262.783.700,- dari anggaran sebesar Rp. 263.292.900,- atau sebesar 99,81%.

Sedangkan kendala yang dihadapi saat melakukan pencapaian indikator kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban umum kepada masyarakat khususnya generasi muda sehingga menghambat proses pelaporan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Kurangnya peningkatan kapasitas SDM petugas Linmas di desa sebagai garda terdepan pelaporan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di desa.

Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Merancang ulang belanja barang dan jasa tahun 2024 untuk meningkatkan penyediaan dana peningkatan kapasitas petugas linmas serta pelaksanaan sosialisasi pelaporan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Meningkatkan koordinasi forkopimcam dan aparat desa agar pelaporan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum semakin lancar dilaksanakan.

Tabel 3. 4 Capaian sasaran kinerja keempat Kecamatan Juai sesuai PK

| No. | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2022 | Kinerja 2023 | | | Target Akhir Renstra | Capaian Terhadap Akhir | Realisasi / Capaian terhadap Kab/Kota Lain | Realisasi / Capaian terhadap RPJMD Provinsi | Realisasi / Capaian terhadap RPJMN | Serapan Anggaran Tahunan (Anggaran Program) |
|-----|--|--------------|--------------|-----------|---------|----------------------|------------------------|--|---|------------------------------------|---|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | | | | | | |
| 1. | Persentase desa tertib administrasi pemerintahan | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 92,64% |
| 2. | Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | 99,99% |

Berdasarkan data tersebut di atas dinyatakan bahwa terdapat 2 (dua) indikator tercapainya sasaran kinerja keempat Kecamatan Juai berupa meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu persentase desa tertib administrasi pemerintahan dan persentase desa tertib administrasi keuangan. Adapun capaian dari kedua indikator tersebut adalah 100%. Terdapat beberapa point yang harus dijelaskan dalam tabel capaian tersebut di atas yaitu sebagai berikut:

1. Capaian tahun 2022 tidak teridentifikasi dikarenakan indikator kinerja tahun 2022 berbeda dengan tahun 2023 sehingga tidak pernah dilakukan pendataan untuk capaian tersebut di tahun 2022.

2. Anggaran yang tersedia untuk pencapaian indikator persentase desa tertib administrasi pemerintahan adalah pada sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa sebesar Rp. 89.563.900,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp.70.479.100,00. Hal ini berarti capaian serapan anggaran sebesar 78,69%.
3. Anggaran tersedia untuk pencapaian indikator persentase desa tertib administrasi keuangan pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa serta sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif sebesar Rp. 146.237.600,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp.141.108.400,00 atau sebesar 96,49%.

Adapun faktor pendorong tercapainya target tersebut adalah sebagai berikut:

1. Formulasi perhitungan capaian indikator persentase desa tertib administrasi pemerintahan adalah Jumlah LPPD dan laporan kinerja BPD yang disampaikan dibagi jumlah seluruh desa dibagi 2 dikali 100% sedangkan indikator persentase desa tertib administrasi keuangan dicapai dengan formulasi perhitungan jumlah desa yang tertib pengelolaan keuangan dan aset desa dibagi jumlah seluruh desa dikali 100% dimana semua desa melaksanakan hal tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Adanya keselarasan penganggaran dengan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target kedua indikator tersebut di atas.
3. Adanya sanksi bagi desa yang tidak memenuhi ketentuan tertib administrasi keuangan tepat waktu yaitu terhambatnya pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).

Solusi yang diupayakan oleh Kecamatan Juai dalam rangka mencapai target kedua indikator tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan SDM di Kecamatan Juai untuk membina, mengawasi dan mengevaluasi dokumen administrasi pemerintahan umum dan dokumen administrasi pengelolaan keuangan desa.
2. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen administrasi pemerintahan umum dan pengelolaan keuangan di desa oleh aparat di Kecamatan Juai.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Kecamatan Juai Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah Rp. 4.812.679.541,00 yang meliputi belanja operasi berjumlah Rp. 4.699.329.941,00 dan belanja modal berjumlah Rp. 113.349.600,00. Anggaran belanja operasi terdiri dari anggaran

belanja pegawai sebesar Rp. 2.798.827.791,00 dan anggaran belanja barang sebesar Rp.1.900.502.150,00. Sedangkan anggaran yang berhasil direalisasikan per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 4.432.197.076,00 atau sekitar 92,09% dan terdiri dari belanja operasi sebesar Rp.4.327.162.076,00 atau 92,08% yang terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp. 2.514.300.984,00 atau sekitar 89,93% dan belanja barang sebesar Rp.1.812.861.092,00 atau sekitar 95,39 % serta belanja modal sebesar Rp.105.035.000,00 atau sekitar 92,66%.

Berikut adalah data perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi masing-masing program kegiatan tahun anggaran 2023 pada kecamatan Juai per 31 Desember 2023:

Tabel 3. 5 Rincian realisasi anggaran per 31 Desember 2023

| No. | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Pagu Anggaran | Realisasi | Rasio Capaian |
|-------|---|------------------|---------------|------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/KabupatenKota | 3.825.463.341 | 3.466.709.276 | 90,62 |
| 1.1 | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 91.990.700 | 91.240.700 | 99,18 |
| 1.1.1 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 75.588.600 | 75.578.600 | 99,99 |
| 1.1.2 | Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD | 5.879.600 | 5.659.600 | 96,26 |
| 1.1.3 | Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 10.522.500 | 10.002.500 | 95,06 |
| 1.2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.905.008.991 | 2.617.065.144 | 90,09 |
| 1.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.798.827.791 | 2.514.300.984 | 89,83 |
| 1.2.2 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 106.181.200 | 102.764.160 | 96,78 |

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|--------|
| 1.3 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 81.600.000 | 80.921.800 | 99,17 |
| 1.3.1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 81.600.000 | 80.921.800 | 99,17 |
| 1.4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 323.247.400 | 314.932.800 | 97,43 |
| 1.4.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1.460.900 | 1.460.900 | 100 |
| 1.4.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 116.057.500 | 107.742.900 | 92,84 |
| 1.4.3 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 125.640.000 | 125.640.000 | 100 |
| 1.4.4 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80.089.000 | 80.089.000 | 100 |
| 1.5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah | 213.705.900 | 156.376.132 | 73,17 |
| 1.5.1 | Penyediaan Surat Menyurat | 70.536.100 | 50.536.100 | 71,65 |
| 1.5.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 135.336.000 | 98.040.032 | 72,44 |
| 1.5.3 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 7.833.800 | 7.800.000 | 99,57 |
| 1.6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 209.910.350 | 206.172.700 | 98,22 |
| 1.6.1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan | 66.750.000 | 64.606.550 | 96,76% |
| 1.6.2 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 90.346.350 | 86.608.700 | 95,86 |

| | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------|
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 96,268,100 | 96,238,100 | 99,97 |
| 2.1 | Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan | 86.217.700 | 86.217.700 | 100 |
| 2.1.1 | Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 86.217.700 | 86.217.700 | 100 |
| 2.2 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat | 10.050.400 | 10.020.400 | 99,7 |
| 2.2.1 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 10.050.400 | 10.020.400 | 99,7 |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 199,160,300 | 199,130,300 | 99,98 |
| 3.1 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 74.046.600 | 74.036.600 | 99,99 |
| 3.1.1 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 5.129.200 | 5.119.200 | 99,81 |
| 3.1.2 | Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 63.087.400 | 63.087.400 | 100 |
| 3.1.3 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 5.830.000 | 5.830.000 | 100 |

| | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------|
| 3.2 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 125.113.700 | 125.093.700 | 99,98 |
| 3.2.1 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 125.113.700 | 125.093.700 | 99,98 |
| 4. | Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum | 119,878,800 | 119,478,800 | 99,67 |
| 4.1 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum | 119,878,800 | 119.478.800 | 99,67 |
| 4.1.1 | Sinergitas dengan Kepolisian Negera Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 119,878,800 | 119.478.800 | 99,67 |
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 341.236.500 | 339.053.100 | 99,36 |
| 5.1 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah | 341.236.500 | 339.053.100 | 99,36 |
| 5.1.1 | Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 143.414.100 | 143.304.900 | 99,92 |

| | | | | |
|-------|--|-------------|-------------|-------|
| 5.1.2 | Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal | 197.822.400 | 195.748.200 | 98,95 |
| 6. | Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 230,672,500 | 211,587,500 | 91,73 |
| 6.1 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 230.672.500 | 211.587.500 | 91,73 |
| 6.1.1 | Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 89.563.900 | 70.479.100 | 78,69 |
| 6.1.2 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 88.390.200 | 88.390.200 | 100 |
| 6.1.3 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | 52.718.400 | 52.718.200 | 100 |

3.3 ANALISIS KINERJA LAINNYA

Dalam analisis kinerja lainnya atas akuntabilitas kinerja tahun 2023 berdasarkan perencanaan kinerja tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel analisis efesiensi capaian anggaran dan kinerja atas sasaran dan indikator sasaran kecamatan juai tahun 2023 berikut ini.

Tabel 3. 6 Data analisis efesiensi anggaran dan kinerja TA 2023 sesuai PK

| Sasaran / Sub Kegiatan | Indikator | Kinerja | | | Anggaran | | | Ket |
|--|--|--------------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Pagu | Realisasi | Capaian | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sasaran I : Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan publik | 87,60 | 87,62 | 100,02% | 96.268.100 | 96.238.100 | 99,97% | Relevan dan Efektif |
| Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di | Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 86.217.700 | 86.217.700 | 100 | Relevan dan Efektif |

| | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|----------------------------|
| Wilayah Kecamatan | kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | | | | |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 10.050.400 | 10.020.400 | 99,70 | Relevan dan Efektif |
| Sasaran II : Meningkatnya fasilitas pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif | 60 | 60 | 100% | 194.031.100 | 194.011.100 | 99,99% | Relevan dan Efektif |
| Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 63.087.400 | 63.087.400 | 100% | Relevan dan Efektif |
| Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 5.830.000 | 5.830.000 | 100% | Relevan dan Efektif |
| Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 50 Keluarga | 50 Keluarga | 100% | 125.113.700 | 125.093.700 | 99,98% | Relevan dan Efektif |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------------------------|
| Sasaran III : Meningkat- nya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan | Persentase gangguan keten- traman dan ketertiban umum yang ditangani | 100% | 100% | 100% | 262.292.900 | 262.783.700 | 99,81 | Relevan dan Efektif |
| Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | 1 Laporan | 1 Laporan | 100% | 119.878.800 | 119.478.800 | 99,67% | Relevan dan Efektif |
| Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 450 Orang | 450 Orang | 100% | 143.414.100 | 143.304.900 | 99,22% | Relevan dan Efektif |

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|-------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------------|
| Sasaran IV : Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintahan Desa | Persentase desa tertib administra-si pemerin- tahan | 100% | 100% | 100% | 287.386.300 | 266.227.300 | 92,64% | Relevan dan Efektif |
| Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 197.822.400 | 195.748.200 | 98,95% | Relevan dan Efektif |
| Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 89.563.900 | 70.479.100 | 91,73% | Relevan dan Efektif |
| Sasaran IV : Meningkatnya Penyelenggara an Pemerintahan Desa | Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan | 100% | 100% | 100% | 146.237.800 | 146.227.800 | 99,99% | Relevan dan Efektif |
| Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 4 Lembaga Kemasyarakatan | 100% | 5.129.200 | 5.119.200 | 99,81% | Relevan dan Efektif |
| Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 88.390.200 | 88.390.200 | 100% | Relevan dan Efektif |
| Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% | 52.718.400 | 52.718.400 | 100% | Relevan dan Efektif |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | Pembangunan Partisipatif | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

Sedangkan berdasarkan hasil rekomendasi yang tercantum dalam dokumen laporan hasil evaluasi LKIP tahun 2022 Nomor : 700/134/ INSPEKTORAT-BLG/IV/2023 tanggal 28 April 2023 maka rencana tindak lanjut yang dilakukan oleh Kecamatan Juai di tahun 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 7 Rencana Aksi TL LHE AKIP Kecamatan Juai Tahun 2023

| No. | Rekomendasi | Rencana Tindak Lanjut |
|-----|--|---|
| 1. | Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis perencanaan kinerja | Dokumen SOP perencanaan kinerja akan disusun dan ditetapkan segera |
| 2. | Memformalkan seluruh dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan kinerja memberikan informasi, strategi, kebijakan dan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) | Dokumen perencanaan kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu namun informasi yang berkaitan dengan crosscutting akan dimasukkan dalam dokumen perencanaan kinerja selanjutnya |
| 3. | Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis | Dokumen SOP/pedoman teknis akan disusun dan ditetapkan segera |
| 4. | Mengajukan usulan peraturan/surat keputusan Bupati yang mengatur penempatan kerja pegawai seperti mutasi, rotasi, promosi, demosi, hingga pemberhentian kerja yang berdasarkan hasil atau capaian kinerja dari pegawai | usulan peraturan/SK Bupati terkait pengaturan penempatan kerja pegawai akan dikoordinasikan dan diusulkan segera |

| | | |
|----|---|---|
| 5. | Mengajukan permintaan revidi laporan kinerja (LKjIP tahun 2023 yang akan datang kepada Inspektorat Daerah (APIP) sebelum dilakukan evaluasi SAKIP dan revidi LPPD | Kecamatan Juai akan menyampaikan surat permintaan revidi laporan kinerja tahun 2023 ke Inspektorat setelah penyusunan laporannya selesai atau setelah tanggal 28 februari 2024 |
| 6. | Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah | Dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 telah memuat narasi rasio capaian tahun 2022 dengan target 2026 namun belum dimuat dalam bentuk tabel data sehingga untuk dokumen LKjIP tahun 2023 hal tersebut akan lebih diperhatikan dan dimuat |
| 7. | Dokumen Laporan Kinerja memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya | Dokumen Laporan Kinerja tahun 2022 telah memuat mengenai perbandingan realisasi kinerja 2022 dengan realisasi kinerja 2021 dan akan terus memuat hal tersebut pada dokumen LKjIP selanjutnya |
| 8. | Dokumen Laporan Kinerja memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) | Dokumen Laporan Kinerja tahun berikutnya akan lebih memperhatikan dan memuat mengenai perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (benchmark kinerja) |
| 9. | Menyusun/membuat pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah diakui/diformalkan, evaluasi dilakukan dengan dasar target kinerja yang telah ditetapkan pada rencana aksi sehingga | Kecamatan Juai akan menyusun dan memformalkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan melakukan evaluasi berkala target kerja rencana aksi SKPD per triwulan |

| | | |
|-----|---|---|
| | evaluasi dilaksanakan triwulan | |
| 10. | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebaiknya dilaksanakan secara berkala sesuai dengan peraturan/pedoman teknis yang telah ditetapkan | Kecamatan Juai akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala sesuai dengan peraturan/pedoman teknis |
| 11. | Melaksanakan perbaikan atas faktor penghambat pada monev dilaksanakan dengan adanya peningkatan realisasi target pada monev triwulan berikutnya | Kecamatan Juai akan memperbaiki faktor penghambat dalam dokumen monev agar dapat dilaksanakan dan meningkatkan realisasi monev triwulan berikutnya |
| 12 | menindaklanjuti rekomendasi pada LHE AKIP tahun sebelumnya dengan indikator peningkatan nilai evaluasi AKIP tahun evaluasi berjalan dengan tahun berikutnya | Kecamatan Juai telah menindaklanjuti rekomendasi LHE tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan meningkatnya nilai AKIP 2022 dibandingkan tahun 2021 serta akan menindaklanjuti LHE tahun 2022 untuk peningkatan nilai hasil evaluasi tahun 2023 |

Adapun beberapa penghargaan yang didapatkan oleh Kecamatan Juai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan dari Bupati Balangan dan Forkompimda atas partisipasi aktif dalam pencapaian vaksinasi Covid-19 tertinggi se-Kalimantan Selatan pada tahun 2021 yang diberikan pada tanggal 14 Februari 2022.
2. Penghargaan Bupati Balangan kepada Linmas Kecamatan Juai sebagai Juara II lomba PBB anggota satlinmas tingkat Kabupaten Balangan dalam rangka HUT ke – 20 tahun 2023.

Sedangkan inovasi yang dilakukan oleh Kecamatan Juai dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

1. Pemetaan Batas Desa Berbasis Partisipatif (PETA BAPER)

Inovasi yang dilakukan oleh seksi penyelenggaraan pemerintahan untuk mempercepat proses pemetaan batas desa di wilayah Kecamatan Juai.

2. Sistem Publikasi Digital (Silikit)

Inovasi yang dilakukan untuk mengaktifkan media informasi digital di Kecamatan Juai.

3. Dana Duka Santunan Kematian Proses Mulus (Ana Tulus)

Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan klaim bantuan uang kematian bagi masyarakat Kabupaten Balangan yang dicanangkan sebagai program kerja Bupati Balangan terpilih saat ini.

4. Sinergi Linmas dengan Masyarakat (Sinar Linmas)

Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama pemberdayaan Satlinmas di desa.

5. Evaluasi Cepat Berkolaborasi dengan Pemerintahan Desa (Si Cabe Pedas)

Inovasi yang dilaksanakan untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan evaluasi administrasi desa di seksi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa khususnya dalam rangka pencapaian target indikator kinerja desa tertib administrasi keuangan desa.

6. Sistem Disposisi Digital (Sidigit)

Inovasi berupa sistem untuk meningkatkan tata kelola pemerintah Kecamatan Juai dengan cara mempermudah proses disposisi surat masuk sehingga memudahkan proses dan meningkatkan keterbukaan komunikasi antar pegawai di Kecamatan Juai.

7. Pengukuran Kinerja dan Keuangan (Kurkinku)

Inovasi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kecamatan Juai khususnya dalam penyusunan dan penyampaian laporan pengukuran capaian kinerja dan keuangan masing-masing aparatur sipil Negara sesuai dengan target perjanjian kinerja yang telah ditentukan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SKPD

Telah dilaksanakan program kegiatan Kecamatan Juai tahun 2023 dengan capaian atas indikator tujuan berdasarkan dokumen perencanaan kinerja tahun 2021-2026 yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat diasumsikan **berhasil** karena capaiannya sebesar 87,62 dengan target sebesar 87,60.

4.2. RANGKUMAN SINGKAT CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam pelaksanaan tugas fungsi kecamatan juai, seluruh stakeholder di Kecamatan Juai berkomitmen untuk mencapai target perjanjian kinerja masing-masing per 31 Desember 2023 Adapun rincian dari capaian perjanjian kinerja kepala SKPD (camat) pada Kecamatan Juai dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4. 1 Daftar rincian capaian indikator perjanjian kinerja tahun 2023

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kinerja Tahun 2023 | | |
|--|----------------------------------|--|---|--------------------|-----------|----------|
| | | | | Target | Realisasi | Capaian |
| Terwujudnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang baik | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Meningkatnya fasilitasi pelayanan masyarakat | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan | 87,60 | 87,62 | 100,02 % |
| | | Meningkatnya fasilitasi pemberdayaan masyarakat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang aktif | 60 | 60 | 100% |
| | | Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum diwilayah kecamatan | Persentase gangguan trantibum yang tertangani | 100% | 100% | 100% |
| | | Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan desa | Persetase desa tertib administrasi pemerintahan | 100% | 100% | 100% |
| | | | Persetase desa tertib administrasi keuangan | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | |



4.3. UPAYA PERBAIKAN

Berapa langkah yang dapat ditempuh kecamatan juai untuk meningkatkan kinerja tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Mempertahankan kinerja yang sudah dicapai yaitu kinerja dengan capaian “sangat berhasil”.
2. Mengevaluasi kembali segala kekurangan-kekurangan yang masih dimungkinkan ada.
3. Mengatasi segala kendala-kendala/hambatan yang ada dalam pencapaian kinerja.
4. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Juai yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan pelayanan;
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM di Lingkungan Kecamatan Juai.
6. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan prosedur pelayanan kepada masyarakat lebih jelas dan transparan.
8. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus terhadap semua kegiatan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Juai ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pencapaian target tahun 2023. Walaupun penyusunan laporan ini masih jauh dari nilai sempurna namun kami harap laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai keberhasilan kinerja Kecamatan Juai Tahun 2023 dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk peningkatan efektifitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Juai, Februari 2024

CAMAT JUAI,



NANANG EDWARD, S.Sos., MM

NIP. 19800127 200604 1 016